

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Gotot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Telp. 024-6921972, 6925554

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

### DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

SEMARANG, 31 Desember 2019  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP,MM.  
NIP. 19640801 198712 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Barang

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Peralatan dan Mesin

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Ekuitas

C.4.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Persediaan

D.3. Beban Barang dan Jasa

D.4. Beban Perjalanan Dinas

D.5. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

E.2. Surplus/Defisit-LO

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.4. Transaksi Antar Entitas

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SEMARANG, 31 Desember 2019  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP,MM.  
NIP. 19640801 198712 1 001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

### Laporan Keuangan DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp475.806.424,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp46.210.367.311,00 atau mencapai 97,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp47.234.450.000,00

#### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.568.571,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.568.571,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.568.571,00.

#### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.863.541,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp46.249.509.454,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-46.227.645.913,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp453.947.883,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-45.773.698.030,00.

#### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp58.705.714,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-45.773.698.030,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp45.734.560.887,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp19.568.571,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0,00	475.806.424,00	0,00	279.581.233,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0,00</b>	<b>475.806.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.581.233,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Barang	B.3.	47.234.450.000,00	46.210.367.311,00	97,83	33.425.864.382,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>47.234.450.000,00</b>	<b>46.210.367.311,00</b>	<b>97,83</b>	<b>33.425.864.382,00</b>

**II. NERACA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	886.527.500,00	886.527.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.	-866.958.929,00	-827.821.786,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>19.568.571,00</b>	<b>58.705.714,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>19.568.571,00</b>	<b>58.705.714,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.4.	19.568.571,00	58.705.714,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>19.568.571,00</b>	<b>58.705.714,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>19.568.571,00</b>	<b>58.705.714,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	21.863.541,00	80.338,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>21.863.541,00</b>	<b>80.338,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Persediaan	D.2.	305.307.050,00	287.510.650,00
Beban Barang dan Jasa	D.3.	6.974.419.966,00	4.501.893.206,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4.	3.471.929.565,00	3.753.858.381,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.6.	6.986.640.600,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.5.	28.472.075.130,00	24.887.484.495,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	39.137.143,00	39.137.144,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>46.249.509.454,00</b>	<b>33.469.883.876,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-46.227.645.913,00</b>	<b>-33.469.803.538,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	453.947.883,00	284.906.245,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	523.000,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>453.947.883,00</b>	<b>284.383.245,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-45.773.698.030,00</b>	<b>-33.185.420.293,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	58.705.714,00	97.842.858,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-45.773.698.030,00	-33.185.420.293,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	45.734.560.887,00	33.146.283.149,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5.</b>	<b>19.568.571,00</b>	<b>58.705.714,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Ruang Lingkup Dishanpan Prov Jateng – Beberapa batasan pengertian lingkup Pangan di bawah ini, mengambil UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya. Terutama yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
5. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
6. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
7. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
8. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 20. Petani adalah warga negara.

9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Barang Operasional	426.080.000,00	468.580.000,00
Belanja Barang Non Operasional	5.765.870.000,00	6.562.355.000,00
Belanja Barang Persediaan	481.550.000,00	336.571.000,00
Belanja Jasa	163.200.000,00	200.350.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.650.850.000,00	3.941.594.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	500.000.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	30.310.000.000,00	35.225.000.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>40.797.550.000,00</b>	<b>47.234.450.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp475.806.424,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	21.813.648,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	49.893,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	453.942.883,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>475.806.424,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 70,19% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	21.813.648,00	80.338,00	27.052,34
Pendapatan Denda	49.893,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	453.942.883,00	279.500.895,00	62,41
<b>Jumlah</b>	<b>475.806.424,00</b>	<b>279.581.233,00</b>	<b>70,19</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp46.210.367.311,00 atau 97,83% dari anggaran belanja sebesar Rp47.234.450.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Barang	47.234.450.000,00	46.233.292.181,00	97,88
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>47.234.450.000,00</b>	<b>46.233.292.181,00</b>	<b>97,88</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-22.924.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>47.234.450.000,00</b>	<b>46.210.367.311,00</b>	<b>97,83</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 38,25% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat pada 35 Kabupaten & kota di Jawa Tengah.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Barang	46.210.367.311,00	33.425.864.382,00	38,25
<b>Total Belanja</b>	<b>46.210.367.311,00</b>	<b>33.425.864.382,00</b>	<b>38,25</b>

### B.3. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp46.210.367.311,00 dan Rp33.425.864.382,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 38,25% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat pada 35 Kabupaten & kota di Jawa Tengah.

#### Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	464.380.000,00	440.150.000,00	5,50
Belanja Barang Non Operasional	6.316.689.966,00	3.872.793.206,00	63,10
Belanja Barang Persediaan	305.302.050,00	282.628.300,00	8,02
Belanja Jasa	193.350.000,00	189.850.000,00	1,84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.471.929.565,00	3.774.708.381,00	-8,02
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	497.990.700,00	0,00	0,00
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0,00	17.500.000,00	-100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	34.983.649.900,00	25.050.000.000,00	39,66
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>46.233.292.181,00</b>	<b>33.627.629.887,00</b>	<b>37,49</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>-22.924.870,00</b>	<b>-201.765.505,00</b>	<b>-88,64</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>46.210.367.311,00</b>	<b>33.425.864.382,00</b>	<b>38,25</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.2. ASET TETAP

#### C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp886.527.500,00 dan Rp886.527.500,00.

#### C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-866.958.929,00 dan Rp-827.821.786,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	886.527.500,00	-866.958.929,00	19.568.571,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>886.527.500,00</b>	<b>-866.958.929,00</b>	<b>19.568.571,00</b>

### C.4. EKUITAS

#### C.4. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.568.571,00 dan Rp58.705.714,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.863.541,00 dan Rp80.338,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	49.893,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	21.813.648,00	80.338,00	27.052,34
<b>Jumlah</b>	<b>21.863.541,00</b>	<b>80.338,00</b>	<b>27.114,45</b>

### D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp305.307.050,00 dan Rp287.510.650,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	305.307.050,00	287.510.650,00	6,19
<b>Jumlah</b>	<b>305.307.050,00</b>	<b>287.510.650,00</b>	<b>6,19</b>

### D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.974.419.966,00 dan Rp4.501.893.206,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	961.908.184,00	945.350.650,00	1,75
Beban Barang Non Operasional Lainnya	736.531.782,00	518.892.556,00	41,94
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	464.380.000,00	440.150.000,00	5,50
Beban Honor Output Kegiatan	4.618.250.000,00	2.407.650.000,00	91,82
Beban Jasa Profesi	176.750.000,00	137.100.000,00	28,92
Beban Sewa	16.600.000,00	52.750.000,00	-68,53
<b>Jumlah</b>	<b>6.974.419.966,00</b>	<b>4.501.893.206,00</b>	<b>54,92</b>

#### D.4. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.471.929.565,00 dan Rp3.753.858.381,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.402.795.426,00	1.142.248.758,00	22,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	797.900.000,00	1.374.552.500,00	-41,95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	926.147.866,00	976.710.000,00	-5,18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	345.086.273,00	260.347.123,00	32,55
<b>Jumlah</b>	<b>3.471.929.565,00</b>	<b>3.753.858.381,00</b>	<b>-7,51</b>

#### D.5. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp35.458.715.730,00 dan Rp24.887.484.495,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	28.472.075.130,00	24.869.984.495,00	14,48
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	17.500.000,00	-100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	6.986.640.600,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.458.715.730,00</b>	<b>24.887.484.495,00</b>	<b>42,48</b>

#### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.137.143,00 dan Rp39.137.144,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.137.143,00	39.137.144,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.137.143,00</b>	<b>39.137.144,00</b>	<b>0,00</b>

#### D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-523.000,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.000,00	5.405.350,00	-99,91
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	453.942.883,00	279.500.895,00	62,41
<b>Jumlah</b>	<b>453.947.883,00</b>	<b>284.383.245,00</b>	<b>59,63</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp58.705.714,00 dan Rp97.842.858,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-45.773.698.030,00 dan Rp-33.185.420.293,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp45.734.560.887,00 dan Rp33.146.283.149,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	46.210.367.311,00
Diterima dari Entitas Lain	-475.806.424,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.734.560.887,00</b>

#### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-475.806.424,00 sedangkan DKEL sebesar Rp46.210.367.311,00.

### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.568.571,00 dan Rp58.705.714,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Silahkan diberikan penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

Silahkan diberikan penjelasan mengenai hal-hal penting lainnya